

Mendorong Lonjakan Investasi

Oleh RIKI MARTUSA

PERKEMBANGAN globalisasi makin menjalar ke seluruh penjuru dunia. Pertumbuhan perusahaan multinasional di benua Asia memberikan perhatian khusus bagi seluruh negara di dunia. Perusahaan besar banyak yang menanamkan modalnya di Asia, karena pangsa pasarnya merupakan salah satu margin laba yang cukup menarik bagi perusahaan-perusahaan tersebut. Munculnya beberapa kepemilikan asing baik dalam berbagai bidang industri di Indonesia menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Indonesia. Terlebih lagi munculnya lonjakan investasi di Jawa Barat. Hal itu menunjukkan, Indonesia menjadi salah satu target penanaman modal bagi perusahaan-perusahaan multinasional. Kondisi Indonesia dinilai para pemodal asing cukup kondusif bagi perkembangan investasinya.

Ada berbagai macam cara untuk meningkatkan suasana kondusif bagi para investor asing. Pemerintah dapat mempersingkat birokrasi penanaman modal asing tetapi prosedur penting tetap dilaksanakan. Pemerintah juga dapat mempermudah untuk penanaman investasi di In-



donesia. Salah satu lembaga investasi yang dapat meningkatkan sumber devisa negara adalah pasar modal. Dari 1912 sampai sekarang, perkembangan pasar modal Indonesia cukup pesat dan memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan investasi di Indonesia. Hal itu ditandai dengan perkembangan jumlah investor yang semakin banyak di pasar modal Indonesia, Bursa Efek Indonesia (BEI). BEI terus mengembangkan diri dalam memperkenalkan berbagai produk investasi kepada masyarakat Indonesia. Salah satunya melalui hadirnya pojok bursa efek di berbagai perguruan tinggi. Hal tersebut memberikan

edukasi investasi bagi mahasiswa di Indonesia.

Pengaruh globalisasi juga memberikan dampak bagi BEI. Bergabungnya perusahaan multinasional di BEI memberikan dampak tersendiri bagi perkembangan pasar modal Indonesia. Bagi investor di BEI, pilihan investasi yang bertambah banyak adalah salah satu daya tarik untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Agar perusahaan multinasional dapat terdaftar di BEI, mereka harus mengikuti semua peraturan di BEI. Salah satunya, mempublikasikan laporan keuangan menurut standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Standar Akuntansi Keuangan Indonesia disusun berdasarkan kepentingan ekonomi, sosial, politik, dan hukum di Indonesia.

Setiap standar akuntansi yang berlaku di suatu negara kemungkinan mempunyai perbedaan sesuai dengan kepentingan masing-masing negara. Hal itu membuat pengeluaran untuk publikasi laporan keuangan menjadi mahal bagi perusahaan multinasional. Sebab perusahaan multinasional yang terdaftar di pasar modal Indonesia dan di pasar modal negaranya harus membuat dua format publikasi laporan keuangan berbeda.

Permasalahan tersebut mem-

berikan kendala bagi iklim investasi di berbagai negara. Kendala tersebut membuat beberapa negara di Eropa, Amerika, dan Asia membentuk lembaga International Accounting Standards Board (IASB). Kemudian IASB menerbitkan International Financial Reporting Standards (IFRS), suatu usulan standar akuntansi keuangan internasional. IFRS disosialisasikan di berbagai negara melalui perguruan tinggi dan lembaga akuntansinya. IFRS akan membantu menunjang iklim investasi di Indonesia terutama pasar modal. Tentu saja sistem tersebut tidak akan cocok seratus persen dengan sistem yang berlaku di seluruh negara di dunia, termasuk di Indonesia. Oleh karena itu, implementasi IFRS di Indonesia membutuhkan pemikiran untuk penyesuaian.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) mencanangkan, Indonesia akan mengadopsi penuh IFRS pada 2012. Ada beberapa pekerjaan rumah bagi DSAK, yaitu harmonisasi IFRS dengan peraturan perpajakan, standar akuntansi syariah, serta peraturan hukum dan ekonomi yang berlaku di Indonesia. Karena praktik perusahaan multinasional pun akan berkaitan dengan peraturan perpajakan, hukum, dan ekonomi.

Pendapat saya, IFRS harus diterapkan pemerintah untuk menunjang iklim investasi yang kondusif di pasar modal Indonesia. Lalu bagaimana dengan peraturan perpajakan, hukum, dan ekonomi? Laporan perpajakan mempunyai tujuan yang berbeda dengan laporan keuangan perusahaan. Laporan perpajakan bertujuan melaporkan kepada pemerintah berapa sumber devisa negara yang harus disetor kepada negara sedangkan laporan keuangan bertujuan memberikan pertanggungjawaban manajemen kepada investor dan kreditor. Oleh karena itu, biarkan saja laporan perpajakan dan laporan keuangan menurut IFRS berjalan sendiri-sendiri. Begitu juga standar akuntansi syariah dan IFRS, biarkan diterapkan secara bersamaan di Indonesia.

Penyesuaian perlu dilakukan antara IFRS dengan sistem hukum dan ekonomi di Indonesia. Beberapa peraturan hukum dan ekonomi di Indonesia harus mendukung pelaksanaan IFRS di Indonesia. Perbedaan bukanlah untuk tujuan saling bertenangan, tetapi akan memperkaya negara Indonesia ini. ***

Penulis, Ketua Program Magister Akuntansi Universitas Kristen Maranatha.